



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 100.3 - 012 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2026

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Propemperkada di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan usulan dari Perangkat Daerah yang telah dilakukan pengujian kelayakan rancangan Perkada oleh Bagian Hukum.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sigi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIGI
 NOMOR 100.3 – 012 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

DAFTAR PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	Perkada	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa Tahun Anggaran 2026	1. Pengalokasian ADD; 2. Penyaluran ADD; 3. Penggunaan ADD; 4. Tata cara perhitungan Rincian ADD; dan 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		√	- DPMD - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

2.	Perkada	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Kewajiban dan larangan 2. Jenis pelanggaran dan hukuman 3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin 4. Tata cara pemeriksaan, penjatuhan hukuman dan penyampaian keputusan 5. Berlakunya hukuman disiplin 6. Upaya administratif.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		√	- BKPSDMD - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
3.	Perkada	Kurikulum Muatan Lokal	1. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal 2. Kurikulum muatan lokal 3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi 4. Pendanaan	√		- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013		√	- Dinas Pendidikan - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 37 ayat (1) huruf j UU Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 9 huruf a Permendikbud 79 Tahun 2014
4.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Perubahan terkait ketentuan retribusi jasa umum pada pelayanan kebersihan		√	- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Perbup Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 1	Pasal 3 dan Pasal 11 Perbup Nomor 30 Tahun 2024
5.	Perkada	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Penetapan kelas jabatan. 2. Lampiran	√		PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah		√	1. Bagian Organisasi Setda Sigi 2. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 1	Pasal 6 ayat (1) huruf a PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013 dan Mencabut Perbup Nomor 46 Tahun 2019

6.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi	1. Perubahan Pasal 5 Visi dan Misi 2. Perubahan Pasal 8 Kedudukan dan Keanggotaan		√	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit		√	- RSUD Tora Belo - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
7.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	1. Tata cara pembayaran dan penyetoran BPHTB 2. Pemeriksaan pajak daerah		√	Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 7 ayat (7) Perda Nomor 11 Tahun 2023
8.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya 2. Objek pajak air tanah untuk fasilitas pendidikan.		√	Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), Pasal 76 ayat (5), Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 124 ayat (6) Perda Nomor. 11 Tahun 2023
9.	Perkada	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perubahan Pasal 2 terkait penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi		√	- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW2	Pasal 122 ayat (3) Perda Nomor 11 Tahun 2023

10.	Perkada	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sigi Tahun 2026 – 2034	1. Visi Misi 1. Arah Kebijakan Penanaman Modal 2. Peta Panduan Implementasi RUPM 3. Pelaksanaan RUPM	√		Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal		√	- DPMPTSP - Bapperida - Bagian Hukum	TW 2	Pasal 4 Perpres Nomor 26 Tahun 2012
11	Perkada	Pengendalian Inflasi dan Mitigasi dampak Inflasi Tahun 2026	1. Pemberian bantuan langsung tunai 2. Subsidi pasar murah 3. Penganggaran 4. Penatausahaan 5. Pertanggungjawaban dan pelaporan 6. pengawasan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026		√	- Bapperida - Bagian Perekonomian - Bagian Hukum	TW 2	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
12	Perkada	Road Map Pengeendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2026 - 2028	1. Road Map 2. Pembiayaan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026		√	- Bapperida - Bagian Perekonomian - Bagian Hukum	TW 2	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
13.	Perkada	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah		√	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah		√	- Bapenda - Bagian Hukum	TW 3	
14.	Perkada	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2027	1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa 2. Prinsip penyusunan APB Desa 3. Kebijakan penyusunan APB Desa 4. Teknis penyusunan APB Desa 5. Hal khusus lainnya.	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa		√	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

15.	Perkada	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa	1. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah; 2. Pembuatan naskah dinas; 3. Pengamanan naskah dinas; 4. Pejabat penandatanganan naskah dinas 5. Pengendalian naskah dinas 6. Pengelolaan kearsipan 7. Pembinaan dan pengawasan	√		Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa		√	- Dinas PMD - Dinas Perpustakaan Kearsipan - Bag Organisasi - Bag Hukum	TW 3	Pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2017
16.	Perkada	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD dan UPTB	Pembentukan UPT Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian		√	1. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah		√	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan - Bagian Organisasi - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
17.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah	1. Perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan & Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan 2. Perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan & Kebudayaan 4. Perubahan struktur organisasi Dinas Pariwisata 5. Perubahan struktur organisasi Dinas Komunikasi & Informatika		√	1. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Dinas Pendidikan & Kebudayaan 2. Dinas Pariwisata 3. Dinas Komunikasi & Informatika 4. Bagian Organisasi Setda Sigi 5. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	Pasal 8 Perda Kab. Sigi No. 5 Tahun 2016
18.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah	1. Perubahan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah		√	1. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2. Permendagri No. 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja BPBD		√	1. BPBD 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 3. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	Pasal 8 Perda Kab. Sigi No. 5 Tahun 2016

						3.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah					
19	Perkada	Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan	1.Susunan Organisasi 2.Tugas dan Fungsi 3.Kelompok Jabatan Fungsional 4.Tata Kerja	√		1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Dinas Pendidikan & Kebudayaan 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 3. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	Mencabut Perbup Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Perkada	Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.Susunan Organisasi 2.Tugas dan Fungsi 3.Kelompok Jabatan Fungsional 4.Tata Kerja	√		1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Pendidikan & Kebudayaan 3. Bagian Organisasi Setda Sigi 4. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	Mencabut Perbup Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
21.	Perkada	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1.Perubahan Susunan Organisasi 2.Perubahan Tugas dan Fungsi		√	1.PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 3. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	Pasal 9 Perda Kab. Sigi No. 5 Tahun 2016

22.	Perkada	Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.Susunan Organisasi 2.Tugas dan Fungsi 3.Kelompok Jabatan Fungsional 3.Tata Kerja	√		1. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 2.Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		√	1. BPBD 2. Bagian Organisasi Setda Sigi 4. Bagian Hukum Setda Sigi	TW 3	Mencabut Perbup Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD
23.	Perkada	Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah	1. Kewenangan pembukaan dan pengelolaan rekening 2. Pengoperasian Rekening 3. Pelaporan dan Pengendalian Saldo Rekening 4. Blokir dan penutupan	√		Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah		√	- BKAD - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 19 PP 39 Tahun 2007
24.	Perkada	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan	1. Arah Kebijakan dan Tujuan 2. Pelaksanaan GDPK 3. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK 4. Pendanaan	√		Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan		√	- Dinas Pengend Pend. & KB - Bapperida - Dinas Pendidikan - Dinkes - Dinas Kepend. dan Capil - DP3A - Dinas Sosial - Disnakertrans - Dinas Kominfo - BKAD - Bag. Hukum	TW3	Pasal 10 Perpres 153 Tahun 2014
25.	Perkada	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 4. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan		√	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004

						Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.					
26.	Perkada	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2. Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		√	- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
27.	Perkada	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa Tahun Anggaran 2027	1. Pengalokasian ADD; 2. Penyaluran ADD; 3. Penggunaan ADD; 4. Tata cara perhitungan Rincian ADD; dan 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan		√	- DPMD - Bagian Hukum	TW 3	Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

						Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE